

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**



**KECAMATAN DLANGGU  
KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022  
CAMAT DLANGGU

Drs. AKHMAD SAMSUL BAKRI, M.Si  
Pembina  
NIP.19700417 199101 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan ..... 1
	A. Latar Belakang ..... 1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ..... 1
	C. Struktur Organisasi ..... 3
	D. Sistematika Penyajian ..... 5
BAB II	Perencanaan Kinerja ..... 6
	A. Rencana Kinerja Tahunan..... 6
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 6
BAB III	Akuntabilitas Kinerja ..... 9
	A. Capaian Kinerja ..... 9
	B. Analisis Capaian Kinerja ..... 10
	C. Realisasi Anggaran ..... 17
BAB IV	Penutup ..... 20
	A. Kesimpulan ..... 20
	B. Saran ..... 20

### Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Dlanggu 2016-2021
2. Matriks Renja Kecamatan Dlanggu Tahun 2021
3. Matriks Renja Kecamatan Dlanggu Tahun 2022
4. IKU Kecamatan Dlanggu
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2021
9. Struktur Organisasi
10. Laporan Kinerja JFU

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Dlanggu berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 3.545 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2.575 km<sup>2</sup> lahan pertanian dan non pertanian 970 km<sup>2</sup> lahan perumahan dan pekarangan.

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Dlanggu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bangsal
- Sebelah Timur : Kecamatan Kutorejo

- Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang
- Sebelah Barat : Kecamatan Puri dan Kec. Jatirejo

Dari luas wilayah 3.545 Km<sup>2</sup> Kecamatan Dlanggu, 2.575 Km<sup>2</sup> atau 73 % adalah lahan pertanian dengan kepadatan penduduk sekitar 15,44 Jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kecamatan Dlanggu sebanyak 56.729 jiwa terdiri dari 28.569 Jiwa laki-laki dan 28.160 jiwa perempuan dengan 19.985 KK

#### PETA WILAYAH KECAMATAN DLANGGU



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Dlanggu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Dlanggu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, adalah terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
  - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.
- h. Jabatan Fungsional Umum

Berkaitan dengan permasalahan utama ( strategic issue ) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

#### a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor startegis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

##### - Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.
2. Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.
3. Adanya Infrastruktur kecamatan seperti gedung kantor lantai 3 yang memadai
4. Adanya kebersamaan dan sistem koordinasi intern yang baik

##### - Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur Kecamatan / jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas.
2. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis.

## b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dlanggu dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

### - Faktor Peluang Organisasi

1. Kecamatan Dlanggu merupakan pintu masuk ke kawasan wisata Pacet dan memiliki potensi untuk pengembangan kawasan wisata seperti Pengembangan Wisata Desa di Desa Randugenengan, Dayang sumbi di Desa Sambilawang, Wisata Petik Jeruk di Desa Jrambe dan Subersono, Kebun Blimbing Desa Kalen, wisata pemancingan, wisata kuliner sehingga sangat prospektif untuk membuka peluang usaha - usaha produktif diantaranya kerajinan, home industry, rumah makan / kuliner, pertokoan dan lain-lain.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Dlanggu juga termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Adanya perbaikan dan pembangunan Infra struktur baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun oleh Pemerintah Desa yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa seperti pembangunan dan perbaikan jalan poros, jalan lingkungan, jalan usaha tani dan jembatan, tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi, perdagangan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke kawasan Dlanggu khususnya dikawasan utara Dlanggu sebagai kawasan industri. Dengan munculnya kawasan industri seperti ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
4. Keadaan masyarakat yang kondusif berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

### - Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih tingginya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik.
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

5. Terdapat aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga perlu dilakukan pelatihan, pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai

### **C. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana strategis Kantor Kecamatan Dlanggu tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Dlanggu pada tahun 2021 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021**  
**KECAMATAN DLANGGU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	86
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%
		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	560 pelayanan
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	81%
		Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 kegiatan
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	16 fasilitasi
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	64
		Nilai SAKIP	79,66

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
KECAMATAN DLANGGU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	86
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%
		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	560 pelayanan
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	81%
		Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 kegiatan
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	16 fasilitasi
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	64
		Nilai SAKIP	79,66

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.000.000	PAPBD 2021
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	97.446.094	PAPBD 2021
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.000.000	APBD 2021
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	PAPBD 2021
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.053.429.727	PAPBD 2021

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Dlanggu tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Dlanggu tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	86	88	100%
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	79%	95%
		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	560 pelayanan	530 pelayanan	95%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	81%	81%	100%
		Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	24 kegiatan	100%
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	16 fasilitasi	16 fasilitasi	100%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	64	71,96	100%
		Nilai SAKIP	79,66	79,66	100%

## B. Analisis Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kecamatan Dlanggu yang pertama adalah terwujudnya pelayanan publik yang optimal, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, sesuai dengan table diatas dapat dijelaskan bahwa 5 (lima) indikator capaian kinerjanya 100% namun 2 (dua) indikator kinerja yang lain yaitu Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan targetnya 82% namun realisasinya 79% sehingga capaian kinerjanya 95%, Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu dengan target 560 pelayanan namun terealisasi 530 pelayanan capaian kinerjanya 95%, hal ini dikarenakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak lagi dikelola oleh Kecamatan tetapi sudah diambil alih kembali oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.

Adapun sasaran strategi yang kedua adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel bersih dan transparan dengan didukung 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan nilai SAKIP, sesuai tabel diatas capaian kinerjanya 100%.

#### a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan pengukuran kinerja, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Dlanggu pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Pelayanan Umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani tepat waktu sesuai standart pelayanan	70%	70%	-	-
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masy dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	1%	1%	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	79%	-	79%	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman	79%	-	79%	-

	dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial				
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	86	-	-	88
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	-	-	79%
	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	560 pelayanan	-	-	530 pelayanan
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	81%	-	-	81%
	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	-	-	24 kegiatan
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 kegiatan	-	-	4 kegiatan
	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	16 fasilitasi	-	-	16 fasilitasi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	64	-	-	71,96
	Nilai SAKIP	79,66	-	-	79,66

**b) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun Renstra**

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	86	88	100%
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	79%	95%
	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	560 pelayanan	530 pelayanan	95%

	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	81%	81%	100%
	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	24 kegiatan	100%
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	16 fasilitasi	16 fasilitasi	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	64	71,96	100%
	Nilai SAKIP	79,66	79,66	100%

c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	Ket (+/-)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	86	-	-
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	79%	-	-
	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	530 pelayanan	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	81%	-	-
	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	-	-
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan	4 kegiatan	-	-

	ketertiban umum			
	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	16 fasilitasi	-	-
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	64	-	-
	Nilai SAKIP	79,66	-	-

d) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

**Tabel 3.5**  
**COST PER OUTCOME**  
**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	224.446.094	95,5%
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		
		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu		
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun		
		Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	3.053.429.727	71,6%
		Nilai SAKIP		

**Tabel 3.6**  
**COST PER OUTCOME**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	86	88	100%	224.446.094	214.248.200	95,5%
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	79%	95%			
	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	560 pelayanan	530 pelayanan	95%			
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	81%	81%	100%			
	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	24 kegiatan	24 kegiatan	100%			
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 kegiatan	4 kegiatan	100%			
	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	16 fasilitasi	16 fasilitasi	100%			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	64	71,96	100%	3.053.429.727	2.186.635.583	71,6%
	Nilai SAKIP	79,66	79,66	100%			

**e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.7**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	100%	95,5%	
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	95%		
		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	95%		
		Persentase rekomendasi	100%		

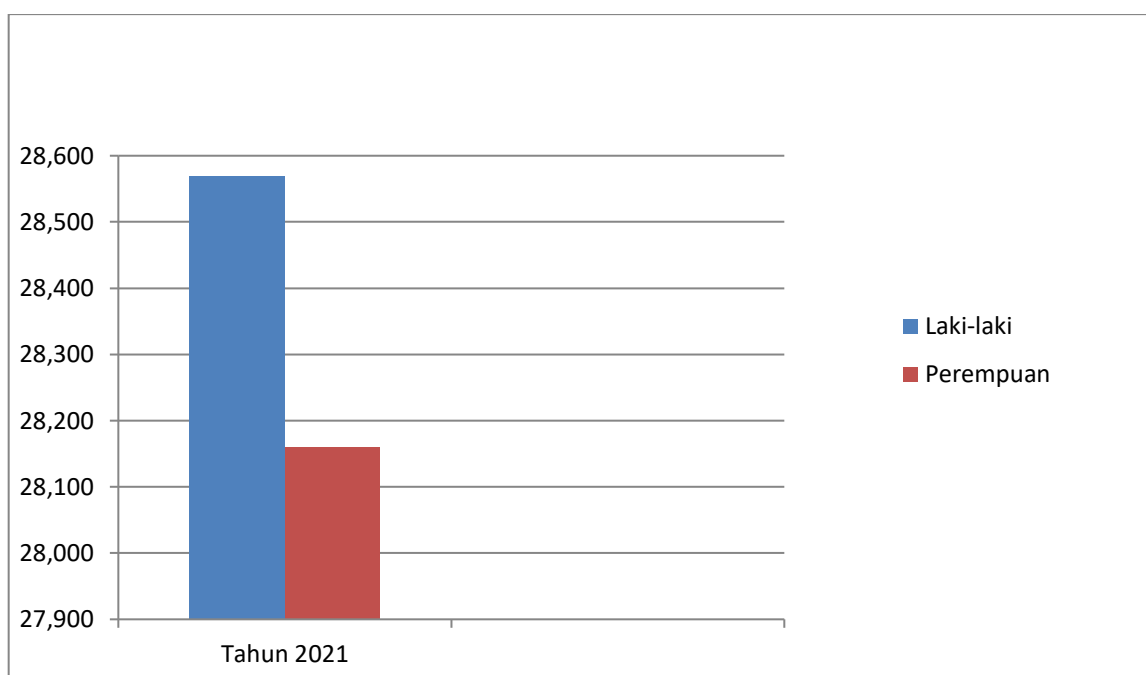
		hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun			
		Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%		
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%		
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%		
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel bersih dan transparan	Nilai reformasi Birokrasi	100%	71,6%	
		Nilai SAKIP	100%		

#### PENYAJIAN DATA KINERJA

**Tabel 3.8**  
**Persentase Penduduk Kec. Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 202**

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2021	28.569	28.160	56.729	98,57

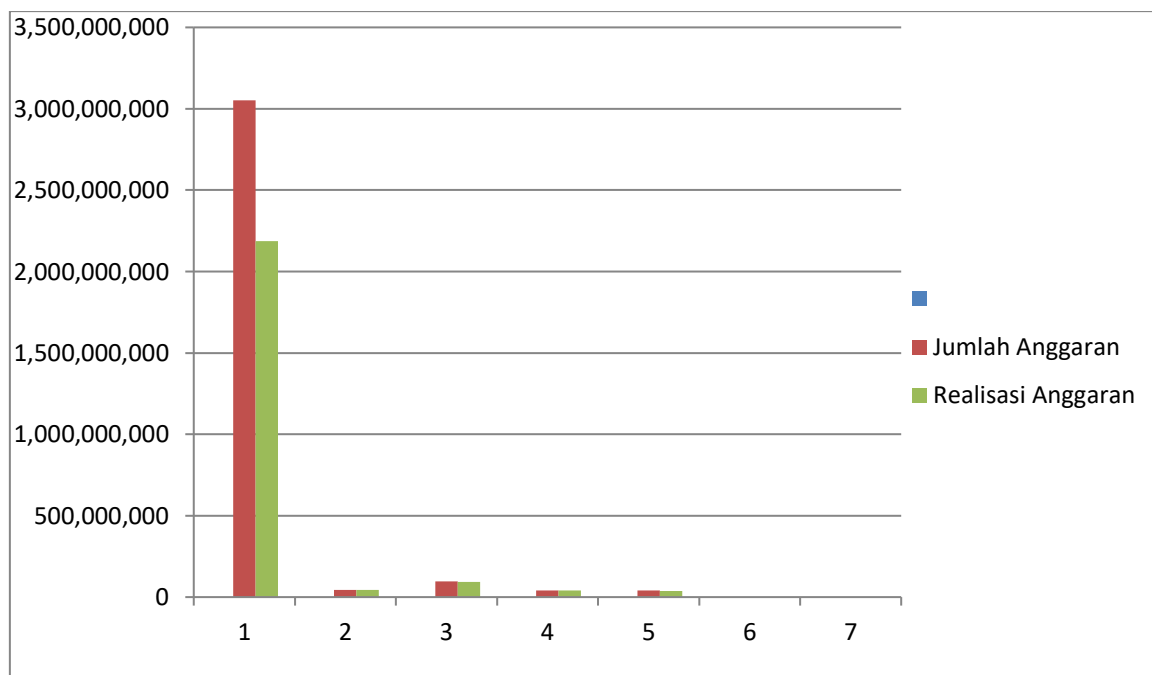
Sumber : data laporan kependudukan Kec. Dlanggu



**f) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja**

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2020**

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.053.429.727	2.186.635.583	71.60%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.000.000	43.838.180	97,42%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	97.446.094	92.912.750	95,35 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.000.000	40.900.000	97,38%
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	40.000.000	36.597.270	91,49%



### C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 sebesar Rp. 3.277.875.821,- penyerapan / realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.400.883.783,- atau 73,25 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	TA. 2020		% Capaian Program
				Target	Realisasi	
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10.000.000	9.920.000	99,20
			2. Evaluasi Kinerja perangkat daerah	15.000.000	14.830.000	98,87
		2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.374.725.247	1.566.738.292	64,88
			2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.000.000	39.341.500	98,35
		3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	8.000.000	7.870.500	98,38
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	8.000.000	7.950.000
		2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		247.000.000	239.358.114	96,91
		3. Penyediaan bahan logistic kantor		24.300.000	24.228.100	99,70
		4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		10.191.040	10.130.700	99,41
		5. Penyediaan bahan material		22.000.000	21.954.500	99,79
		6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		15.000.000	14.820.000	98,80
		5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	145.000.000	143.130.500
		6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	30.404.480	22.668.817	74,56

					dan listrik			
				2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	26.808.960	26.808.960	100
		7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	45.000.000	44.341.600	98,54
				2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.000.000	2.000.000	100
				3.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor / bangunan lainnya	20.000.000	19.985.500	99,93
				4.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	10.000.000	9.900.000	99,00
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	10.000.000	9.515.550	95,16
				2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	35.000.000	34.322.630	98,06
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1.	Singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	60.000.000	56.757.000	94,60
				2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	37.446.094	36.155.750	96,55

4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1.	wilayah kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	32.000.000	31.000.000	96,88
				2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	10.000.000	9.900.000	99,00
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	5.000.000	4.280.000	85,60
				2.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	9.000.000	6.978.000	77,53
				3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	6.000.000	5.921.000	98,68
				4.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	5.000.000	4.830.170	96,60
				5.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	15.000.000	14.588.100	97,25
			Jumlah			3.277.875.821	2.400.883.783	73,25

Berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang meliputi 5 (empat) Program, 4 (empat) program secara keuangan sudah mencapai target tetapi 1 (satu) program yang lain secara keuangan belum mencapai target hal ini dikarenakan pada belanja gaji terdapat penyerapan anggaran yang relatif kecil disebabkan jumlah ASN yang berkurang karena mutasi, pensiun dan meninggal dunia, tetapi kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari beberapa indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 telah menunjukkan capaian 100% tetapi juga ada indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai target yaitu indikator Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dan Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang berubah dimana Perijinan IMB mulai pertengahan tahun 2021 diambil alih atau dikelola lagi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mojokerto

Adapun secara keuangan dari 5 (lima) program pendukung indikator kinerja yang telah dilaksanakan, 4 (empat) program secara keuangan sudah mencapai target sedangkan 1 (satu) program yang lain secara realisasi keuangan belum mencapai target tetapi kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik.

#### **Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :**

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun mendatang optimalisasi penyerapan anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
- Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan unit internal dan Dinas / instansi terkait.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 sebesar Rp. 3.277.875.821,- dapat terserap sebesar Rp. 2.400.883.783,- atau 73,25 %.

### **B. SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Dlanggu pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program / kegiatan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi pada kegiatan–kegiatan yang dapat ditekan.
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan dan jumlah Pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, dll.

Dlanggu, Januari 2022

**CAMAT DLANGGU**

**Drs. AKHMAD SAM SUL BAKRI, M.Si**

Pembina

NIP 19700417 199101 1 003

# LAMPIRAN - LAMPIRAN